

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dan acuan peneliti serta dapat dijadikan sebagai data pendukung. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Budi dan Priyadi. (2018). Analisis Modal Sosial dalam Pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. Permasalahan pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola terhadap masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kelompok Kandang Gunung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek modal sosial yang meliputi: Aspek *trust* dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit belum seutuhnya dimiliki karena kurangnya sosialisasi oleh Pokdarwis Kandang Gunung Desa Nongkosawit sehingga masyarakat belum memiliki *trust*. Pengurus Pokdarwis juga tidak memperlihatkan motivasi, kemampuan, dan reputasi sebagai seorang penggerak masyarakat dalam pengelolaan Desa

Wisata. Ditinjau dari aspek *norms*, Desa Wisata Nongkosawit memiliki norma keagamaan yang menjadi norma paling dominan. Namun, norma ini belum mampu digunakan untuk menunjang pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit. Sementara, ditinjau pada aspek *networks*, Pokdarwis Kandang Gunung memiliki jaringan yang cukup sempit. Pokdarwis ini hanya menjalin jaringan dengan tiga aktor yaitu masyarakat Desa Wisata Nongkosawit, Forum Komunikasi Desa Wisata Kota Semarang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2. Veri Titis Widiawatin. (2021). Modal Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Umul Susuhan Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Permasalahan pada kepercayaan setiap pengelola yang masih lemah. Setiap pengelola masih kurang mentaati norma atau peraturan yang berlaku, sehingga modal sosial tidak berjalan dengan baik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Manjungan Kecamatan Ngawen sebagai penggerak dalam mengembangkan pariwisata Umul Susuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat sangat berguna bagi pengembangan objek wisata Umbul Susuhan Desa Manjungan. Pada aspek kepercayaan, diantara pengelola tergolong lemah. Hal ini terjadi karena krisis kepercayaan dan menganggap pengelola

lain tidak memiliki kemampuan untuk mengelola objek wisata Umbul Susuhan. Pada aspek norma, diwujudkan dalam bentuk AD/ART organisasi BUMDes dan peraturan non formal yang harus ditaati bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Umbul Susuhan. Pada aspek jaringan, terdapat keterlibatan secara aktif dari pengelolaan, PKK, dan karyawan.

3. Diana Alfianti. (2021). Modal Sosial Dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Permasalahan yang terjadi selama proses pengembangan ekowisata di Desa Marente adalah belum adanya peraturan tentang larangan wisatawan, sehingga modal sosial ini membentuk norma atau peraturan yang tujuannya untuk berkomitmen bersama dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Marente dan pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat di Desa Marente untuk mengembangkan objek wisatanya, antara lain masyarakat Desa Marente khususnya pengelola ekowisata membentuk aturan-aturan dalam melakukan pengembangan ekowisata yang merupakan suatu komitmen bersama agar pengembangan dapat berjalan sesuai dengan apa yang

telah direncanakan. Aturan-aturan tersebut berupa larangan kepada masyarakat maupun wisatawan untuk tidak membawa dan minum-minuman keras di area objek wisata, larangan kepada wisatawan asing untuk tidak menggunakan pakaian yang terbuka atau tidak sopan di pemukiman warga pada saat berjalan menuju objek wisata, aturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih dan asri serta tidak merusak fasilitas objek wisata dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon di area objek wisata. Dari pembahasan diatas bahwa bentuk modal sosial dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat khususnya pengelola wisata, dan peran modal sosial tersebut adalah masyarakat dapat memenuhi kewajibannya yaitu mematuhi aturan-aturan yang sudah disepakati dalam mengembangkan ekowisata di Desa Marente sehingga ikatan timbal balik antara masyarakat dengan objek wisata yang ada, dan objek wisata akan terjaga jika masyarakat memenuhi komitmen yang telah dibentuk.

Relevansi ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah guna membandingkan hasil penelitian terdahulu di mana memiliki subjek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian saat ini. Kebanyakan dari penelitian terdahulu menggambarkan modal sosial dari beberapa aspek dan yang paling banyak pada aspek kepercayaan. Sementara itu, penelitian saat ini memiliki kekhasan dan kebaruan dalam hal meneliti modal sosial yang dimanfaatkan oleh Pokdarwis (kelompok sadar wisata) yang merupakan salah satu organisasi untuk mengembangkan wisata. Penelitian juga dilakukan

berdasarkan perspektif pekerjaan sosial. Adapun lokasi penelitian yaitu Pantai Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen merupakan lokasi penelitian di mana belum pernah ada penelitian serupa di lokasi tersebut dan lokasi ini baru saja diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2.1 Relevansi dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Nama Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
1.	Analisis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang	Budi dan Priyadi (2018)	Kualitatif	Penelitian ini dibagi tiga aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Trust</i> dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit belum seutuhnya dimiliki karena kurangnya sosialisasi oleh Pokdarwis Kandang Gunung b. <i>Norms</i> pada Desa Wisata Nongkosawit memiliki norma keagamaan yang menjadi norma paling dominan c. <i>Networks</i> Pokdarwis Kandang Gunung memiliki jaringan yang cukup sempit karena hanya menjalin tiga faktor yaitu masyarakat Desa Wisata 	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada latar belakang permasalahan dan lokasi penelitian. <ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang pada penelitian ini menjelaskan faktor hambatan dari kelompok sadar wisatanya, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan memanfaatkan <i>stakeholder</i> pokdarwis dan potensi sumber alam yaitu Pantai Pandan Kuning b. Lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Kebumen, sedangkan penelitian ini di Kota Semarang

				Nongkosawit, Forum Komunikasi Desa Wisata Kota Semarang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	
2.	Modal Sosial Dalam Pengembang an Pariwisata Umul Susuhan Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten	Veri Titis Widiawa tin (2021)	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukkan: a. Aspek kepercayaan pada pengelola tergolong lemah karena menganggap pengelola lain tidak memiliki kemampuan untuk mengelola objek wisata Umul Susuhan b. Aspek norma diwujudkan dalam bentuk AD/ART organisasi BUMDes dan peraturan non formal c. Aspek jaringan aktif dari pengelolaan, PKK, dan karyawan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pengelola yang tergolong lemah dan lokasi yang berbeda. a. Pengelola wisata Umul Susuhan dari masyarakat, sedangkan pengelola wisata Pantai Pandan Kuning dari Pokdarwis b. Lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Kebumen, sedangkan penelitian ini di Klaten
3.	Modal Sosial Dalam Pengembang an Ekowisata di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten	Diana Alfinti (2021)	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan: a. Pengelola ekowisata membentuk aturan-aturan yaitu dengan melakukan komitmen	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek yang digunakan dan lokasi penelitian. a. Objek penelitian ini berfokus pada ekowisata yang

	Sumbawa			bersama agar pengembangan berjalan sesuai dengan rencana b. Aturan-aturan tersebut berupa larangan untuk tidak membawa dan minum-minuman keras, tidak menggunakan pakaian terbuka, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih	mana lebih diutamakan pada perekonomian wisata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengelola wisatanya yaitu Pokdarwis Pantai Pandan Kuning b. Lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Kebumen, sedangkan penelitian ini di Sumbawa
--	---------	--	--	--	---

Penelitian terdahulu ini memberikan gambaran kepada peneliti mengenai apa saja hal-hal yang diteliti pada konsep modal sosial. Ketiga penelitian terdahulu diatas juga memudahkan peneliti dalam mencari literatur maupun data yang dibutuhkan serta konsep yang diteliti. Hal yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian dan teori yang berbeda-beda, sehingga keragaman penjelasan hasil akan terjadi, namun hubungan saling keterkaitan antar komponen dari teori yang berbeda akan mendapat kesimpulan terikat satu sama lain.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Pada sub bab teori yang relevan akan menjelaskan mengenai kerangka konsep yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai modal sosial pokdarwis dalam pengelolaan pariwisata Pantai Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

2.2.1 Teori tentang Modal Sosial

Putnam dalam (Anyualatha Haridison 2013) mendefinisikan modal sosial adalah suatu kumpulan dari asosiasi-asosiasi yang bersifat horizontal di antara orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas dari masyarakat setempat. Asosiasi-asosiasi yang dimaksud, termasuk jejaring dari pertalian warga masyarakat (*civic engagement*) dan norma-norma sosial. Asumsi yang mendasari konsep Putnam adalah: (1) jejaring dan norma-norma yang secara empiris saling terikat; dan (2) jejaring dan norma-norma dimaksud mempunyai konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang penting. Oleh sebab itu, ciri kunci dari modal sosial sebagaimana definisi Putnam adalah modal sosial memfasilitasi koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama (timbal balik) dari para anggota suatu asosiasi.

Robinson (dalam Rusdi Syahra, 2003) menyatakan bahwa konsep dasar modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip modal sosial yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya serta mereka yang mau melangkah bersama-sama dan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan mampu mengatasi masalah-masalah dalam komunitasnya serta dapat menjadi masyarakat yang maju dan berkembang.

Makna pendapat tersebut yaitu jika masyarakat mampu untuk memfokuskan dan mendayagunakan relasi-relasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, maka permasalahan sosial dan ekonomi dapat teratasi, selain itu pula berdampak positif pada kemandirian dan produktivitas masyarakat itu sendiri, sehingga muncul keyakinan bahwa modal sosial menyorot kepada investasi terhadap relasi atau hubungan sosial.

Hasbullah (2006) mendefinisikan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya (*resources*) adalah suatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Lebih lanjut, Hasbullah (2006) menyatakan bahwa inti dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok untuk bekerja sama membangun jejaring untuk mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bourdieu dan Wacquant dalam Usman Sunyoto (2018:21) menjelaskan bahwa: *social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a grup by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition.*

Artinya, modal sosial merupakan jumlah sumber daya, baik nyata maupun maya, yang diperoleh individu atau kelompok karena memiliki jaringan yang tahan lama dari hubungan yang kurang lebih terlembaga, saling mengenal dan saling mengakui. Modal sosial menjadi hal penting untuk dimiliki oleh suatu kelompok atau lembaga sosial sebagai sebuah sumber daya di mana norma-norma yang ada dapat dimanfaatkan oleh para anggota-anggota kelompok tersebut

sehingga mempengaruhi kerjasama di antara anggota untuk mencapai tujuan kelompok atau lembaga.

Fukuyama (2005) modal sosial itu sendiri merupakan norma-norma yang membentuk jalinan kerjasama antara dua atau lebih individu. Norma ini bisa merupakan interaksi antar individu, baik dalam bentuk yang sederhana seperti pertemanan, maupun yang lebih kompleks seperti keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Norma ini hidup berlandaskan pada komitmen, serta keterikatan satu sama lain, sehingga membentuk kerjasama dalam komunitas masyarakat.

Adapun pendapat Putnam dalam Hidalgo *et al* (2021:6) mendefinisikan modal sosial sebagai berikut:

“Social capital refers to aspects of social organisation, such as networks, norms and bonds of trust, which facilitate coordination and cooperation mutual benefits. Expansion of the social and human capital of community is associated with the presence of social leadership, who mobilise social actors and maximize social development action.”

Artinya, modal sosial mengacu pada aspek organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan ikatan kepercayaan, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk saling menguntungkan. Perluasan terhadap modal sosial dan manusia dari suatu komunitas dikaitkan dengan kehadiran kepemimpinan yang memobilisasi aktor sosial dan memaksimalkan aksi pembangunan sosial. modal sosial menjadi bagian penting dalam memunculkan partisipasi bagi organisasi sosial, seperti kelompok masyarakat di mana modal sosial dijadikan sebagai pengikat untuk memperoleh suatu keuntungan baik materi dan non materi.

Modal sosial lazim dikaitkan dengan upaya mengelola meningkatkan dan mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan

untuk memperoleh keuntungan, ekonomi, dan/atau manfaat sosial. Relasi-relasi sosial tersebut diendapi oleh norma-norma yang memberikan jaminan, kepercayaan, serta jaringan yang saling menguntungkan. Lebih jelas lagi Robert D. Putnam (dalam Supratiwi, 2013) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jaringan-jaringan kerja (*networks*) yang terkoordinasi. Kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dari jaringan-jaringan kesepakatan antar warga. Modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterikatan tersebut merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi dan prasyarat mudah bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif.

Pengertian lain dari modal sosial yang dikaji dalam perspektif komunitas menurut Woolcock dalam Fathy (2019) menyatakan bahwa modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas. Pengertian ini mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan *social trust*, serta memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sebuah komunitas dapat berjalan dengan baik apabila terdapat modal sosial yang dapat membangun mulai dari jaringan, norma hingga kepercayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi komunitas tersebut. Pada penelitian ini hanya akan meneliti 3 komponen dari modal sosial tersebut yaitu:

2.2.1.1 Jaringan

Putnam dalam Hasbullah (2006) menyatakan bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta

meningkatkan manfaat dari partisipasinya itu. Hal ini diperkuat oleh Damsar (2009) yang menyebutkan bahwa jejaring sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar kelompok lainnya atau lembaga terkait organisasi tersebut. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk formal ataupun bentuk informal. Bentuk formal merupakan hubungan yang ditandai dengan adanya perjanjian kerjasama sedangkan bentuk informal ditandai dengan adanya kesukarelaan atau tidak ada perjanjian kerja.

Jaringan atau kerja sama diperlukan hubungan yang harmonis dan kesatuan arah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan kerja sama ada dua macam yaitu kerjasama formal adalah kerjasama yang diatur oleh atasan dalam bentuk mekanisme kerja antar unit yang berhubungan secara administratif, sedangkan kerjasama non formal adalah kerjasama yang tidak diatur, tetapi dapat dilaksanakan dan dikembangkan antar personal guna meningkatkan efisiensi kerja suatu organisasi. (dalam Yulianti & Suwandono, 2016)

Modal sosial dibagi menjadi beberapa bentuk. Hal ini didasarkan pada pendapat Woolcock dalam Usman Sunyoto (2018:68) menyebutkan bahwa modal sosial memiliki bentuk-bentuk berdasarkan tipe ikatan sosial (jaringan sosial) yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Modal sosial mengikat (*bonding social capital*), berarti ikatan antar orang yang sama. Tipe modal sosial ini adalah tipe dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, keluarga dekat, teman akrab, dan rukun tetangga.

2. Modal sosial menjembatani (*bridging social capital*), mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang. Pengertian lain menjelaskan bahwa tipe ini merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Tipe ini muncul karena adanya berbagai kelemahan di sekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. Misalnya, seperti teman jauh dan rekan kerja.
3. Modal sosial menghubungkan (*linking social capital*), menjangkau orang-orang pada situasi berbeda yang sepenuhnya berada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya yang tersedia di dalam komunitas. Misalnya, hubungan antara elite politik dengan masyarakat umum.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam membentuk jejaring sosial dapat dilihat berdasarkan sifat formal dan informal di mana kerjasama terjadi karena adanya hubungan dan relasi-relasi antara anggotanya yang saling tahu dan saling membantu, diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan pada kelompok tersebut sehingga menjadi cocok satu sama lain. Interaksi yang tumbuh dalam hubungan-hubungan pada kelompok atau orang tersebut dapat menjadikan kerjasama menjadi lebih kuat dan lebih menguntungkan dalam menopang kepercayaan dan norma yang ditaati bersama-sama. Jaringan juga dapat ditinjau berdasarkan bentuk ikatan sosialnya di mana

dapat memperkuat dan menyatukan masing-masing kebutuhan individu dalam suatu kelompok.

2.2.1.2 Norma Sosial

Norma-norma terdiri dari pemahaman, nilai, harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat terbentuk dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti kode etik yang berupa pra-kondisi ataupun produk dari kepercayaan sosial. Berzina (2011) mendefinisikan norma sosial berdasarkan pada simpulan dari pendapat-pendapat para ahli sebelumnya, Berzina menyatakan bahwa:

Second group – social norms include rules, value, and expectancies that characterize the member of the network. Many of these rules are unwritten. Some of these norms have behavioural component, requiring people to do certain things; and others are affective, concerning how we feel about the network group, etc. trust is based on peoples sharing a personal identity and values. It means that people hold common values including a common concept of moral obligations, common norms, which can develop in long-standing relationship based on trust.

Artinya, kelompok kedua – norma sosial mencakup aturan, nilai, dan harapan yang menjadi ciri anggota jaringan. Banyak dari aturan ini tidak tertulis. Beberapa dari norma-norma memiliki komponen perilaku, mengharuskan orang untuk melakukan hal-hal tertentu; dan yang lainnya bersifat afektif, mengenai bagaimana perasaan kita tentang kelompok jaringan, dan lain-lain.

Pengertian norma menurut Soedjono Dirdjosisworo (2010) adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat

membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan dan kepentingan mereka tidak selalu sama dan seirama, bahkan sering bertolak belakang dan bertabrakan karena seseorang itu pada dasarnya tidak mau dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, sehingga perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan sesamanya. Ketentuan-ketentuan atau peraturan itu yang disebut dengan norma atau kaidah.

Sianturi (2012) membagi norma yang ada dalam masyarakat tersebut dalam 4 (empat) kategori yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Berikut penjelasan kategori norma:

1. Norma keagamaan adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Allah. Norma agama bersumber dari Allah yang terdapat dalam kitab suci. Contoh dari norma agama antara lain dilarang untuk mencuri, berzina, mabuk-mabukan, perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.
2. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan pada kata hati nurani, tegasnya adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan jahat. Contoh dari norma kesusilaan antara lain bertingkah laku jujur, tidak memfitnah orang lain, tidak menghina orang lain, dan lain-lain.

3. Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam suatu masyarakat tertentu tentang sopan santun dalam hubungan antar anggota masyarakat sesamanya. Norma kesopanan dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Contoh dari norma kesopanan adalah jangan menyela orang lain, jangan makan sambil berbicara, jangan meludah disembarang tempat, orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua, dan lain-lain.
4. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Contoh dari norma hukum yaitu menjaga keamanan di lingkungan dan lain-lain

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa norma sosial dalam modal sosial memiliki maksud dan tujuan untuk mencegah individu untuk melakukan penyimpangan terhadap hal-hal yang telah disepakati. Norma pada dasarnya bersifat tertulis dan tidak tertulis sebagai acuan dalam masyarakat pada kelompok atau organisasi tertentu terhadap aturan-aturan kolektif. Norma dijalankan secara terus menerus dan terbentuk melalui proses yang lama. Norma mempengaruhi hubungan jangka panjang dan merupakan pembentuk dari sebuah jaringan dan kepercayaan sosial.

2.2.1.3 Kepercayaan Sosial

Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial yang tinggi dalam masyarakat

cenderung memiliki aturan-aturan sosial yang bersifat positif dan pada akhirnya terbentuk hubungan-hubungan kerjasama yang baik pula. Kepercayaan didasarkan pada orang-orang yang berbagai identitas dan nilai pribadi. Ini artinya bahwa orang-orang memegang nilai-nilai umum termasuk konsep umum mengenai kewajiban moral, norma-norma umum, yang dapat berkembang dalam hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan.

Fukuyama (2005:24) mendefinisikan kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi-bagi antara kelompok-kelompok terbatas masyarakat dan bukan dengan yang lainnya dari masyarakat atau dengan lainnya dalam masyarakat yang sama. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggotanya yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Fukuyama (2002:72) mengatakan bahwa kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan *social capital*. Jika masyarakat bisa diandalkan untuk tetap menjaga komitmen, norma-norma saling menolong yang terhormat, dan menghindari perilaku oportunistik, maka berbagai kelompok akan terbentuk secara lebih cepat, dan kelompok yang terbentuk itu akan mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien.

Menurut Fukuyama (2005:75) kepercayaan seharusnya di ingat dalam dirinya sendiri bukan merupakan kebajikan moral, tetapi lebih merupakan efek samping dari kebajikan. Kepercayaan muncul ketika masyarakat saling berbagi norma-norma kejujuran dan ketersediaan untuk saling menolong dan oleh

karenanya mampu bekerja sama satu dengan yang lain. Kepercayaan dihancurkan oleh sikap mementingkan diri sendiri yang eksekif atau *oportunisme*. Maka dari itu, kepercayaan dapat membuat orang-orang bisa bekerja sama secara lebih efektif karena bersedia menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu.

Dalam Usman Sunyoto (2018) terdapat 3 (tiga) kategori rasa saling percaya (*trust*) antara lain:

1. Persamaan pandangan menurut James Coleman (dalam Usman Sunyoto, 2018) adalah rasa saling percaya terbentuk berawal dari adanya kesamaan pandangan.
2. Bentuk rasa saling percaya/ keterlibatan menurut James Coleman (dalam Usman Sunyoto, 2018) adalah bentuk rasa saling percaya dari keinginan untuk terlibat dalam hubungan kerjasama.
3. Keterbukaan menurut Fukuyama (dalam Usman Sunyoto, 2018) adalah bentuk rasa saling percaya dengan adanya perilaku jujur (salah satunya terbuka) dalam suatu jejaring.

Dari semua pendapat dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai pengikat masyarakat dalam membentuk modal sosial yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Hubungan *manol* dan pedagang serta pembeli dalam melakukan transaksi yang sama-sama mengharapkan adanya kejujuran. Kepercayaan tidak dapat muncul seketika, melainkan membutuhkan proses dari hubungan antara pelaku usaha yang sudah lama terlibat dalam perilaku ekonomi secara bersama.

2.2.2 Teori Tentang Pariwisata

A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya serta melakukan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Meyers dalam Suwena (2017:21) mengemukakan bahwa pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya. Selain itu, menurut Suwanto dalam Simanjuntak, Tanjung, dan Nasution (2017:3), menyatakan bahwa pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan, misalnya untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu sehingga terdorong untuk bepergian dengan motif berbagai kepentingan, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, kesehatan, dan kepentingan lain seperti ingin tahu, menambah pengalaman atau untuk meneliti.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada Bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 4 menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk bersenang-senang dalam jangka waktu sementara dan tidak untuk mencari nafkah.

2.2.2.1 Desa Wisata

Menurut Firmansyah (2012), desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi (2009), desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.

Keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Mendapat dukungan dari masyarakat setempat bukan hanya dari individu atau suatu kelompok tertentu. Inisiatif menggerakkan modal usaha, profesionalisme pemasaran, citra yang jelas harus dikembangkan karena keinginan wisatawan adalah mencari hal yang special dan produk yang menarik.

2.2.2.2 Pengelolaan Pariwisata

Soewarno (dalam Suryo, 2012) menyatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumberdaya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Artinya pengelolaan merupakan suatu proses mengendalikan dan menyelenggarakan sumber daya yang tersedia baik alam maupun manusia yang dikemas menjadi suatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemilik sumber daya. Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu:

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis
3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode

2.2.2.3 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Adanya Pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi

pariwisata di daerah itu. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan daerah wisatanya sehingga tidak hanya Pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri.

Tujuan dari pembentukan Pokdarwis yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan yaitu: (1) sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan (2) sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah. Lingkup kegiatan pokdarwis yang dimaksud adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain:

1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.

2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
4. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
5. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
6. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

Kelompok sadar wisata merupakan organisasi yang peduli dengan pengembangan pariwisata yang ada di daerah setempat. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi dalam pengembangan wisata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai subjek atau pelaku pembangunan

Sebagai subjek atau pelaku pembangunan, yaitu masyarakat juga harus memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pengembangan kepariwisataan bersama dengan pemangku kepentingan juga memiliki peran yang terkait baik dari Pemerintah maupun swasta, maka hal tersebut masyarakat juga memiliki peran dan tanggungjawab bersama-sama untuk

mendorong keberhasilan dalam pengembangan kepariwisataan di wilayahnya.

2) Sebagai penerima manfaat

Dengan adanya pariwisata diharapkan masyarakat mendapatkan nilai manfaat baik dalam ekonomi maupun kesejahteraan sosial, serta untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya.

3) Sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif

Salah satu aspek dasar untuk tercapainya keberhasilan dalam pembangunan kepariwisataan adalah dengan diciptakannya lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) memiliki peran penting dan tanggungjawab bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana kondusif. Dengan adanya lingkungan dan suasana yang kondusif diharapkan wisatawan akan merasa nyaman dan tidak bosan terhadap lingkungan wisata tersebut.

4) Mewujudkan Sapta Pesona dalam masyarakat

Sapta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Unsur sapta pesona meliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sebagai salah satu unsur

penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya langkah dan juga upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan, dan melaksanakan secara konsisten. Sehingga Kelompok Sadar Wisata sebagai salah satu penggerak dalam masyarakat memiliki peran dalam mewujudkan Sapta Pesona tersebut. Terciptanya Sapta Pesona tersebut tentu akan memberi dampak positif bagi tempat wisata tersebut karena dapat menambah daya tarik wisatawan sehingga secara tidak langsung akan dapat meningkat jumlah wisatawan yang datang.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pokdarwis meliputi mengembangkan dan melaksanakan kegiatan guna meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepariwisataan, meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan dalam mengelola sebuah usaha, mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat, serta memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

2.2.3 Teori tentang Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial menjadi salah satu profesi di Indonesia yang telah memiliki regulasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 di mana profesi ini memiliki berbagai peranan. Sheer & Jones (2020:29), menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah:

Social work is the profession of caring and intervening in the interactions between individuals, groups, and communities to enhance or restore well-being and to create societal conditions that help individuals, groups, and

communities enhance their own well-being. Social workers select, use, and develop interventions based on the best available evidence.

Berdasarkan pendapat tersebut, memiliki pengertian bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang peduli dan melakukan campur tangan dalam interaksi individu, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kesejahteraan dan untuk menciptakan kondisi sosial yang membantu individu, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pekerja sosial memilih, menggunakan, dan mengembangkan intervensi berdasarkan bukti terbaik yang tersedia. Modal sosial merupakan aset yang dimiliki oleh masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Ife (dalam Isbandi, 2008) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat diperankan oleh pelaku perubahan (*agent of change*) yang memiliki keterampilan (*skills*) sebagai pemberdaya masyarakat, yaitu seorang *community worker* atau pekerja sosial dengan masyarakat.

Peran pekerja sosial makro berkaitan dengan modal sosial masyarakat, karena seperti yang telah dijelaskan di atas salah satu perannya adalah mengembangkan aset masyarakat dimana hal ini mengarah pada pengertian modal sosial yang digambarkan sebagai aset masyarakat. Selain itu, peran berikutnya adalah membantu mengembangkan sumber daya lokal dalam hal ini berarti pekerja sosial makro bersama dengan masyarakat mengembangkan aset berupa modal sosial yang telah dimiliki untuk memanfaatkan potensi lokal wilayahnya dalam rangka pengembangan masyarakat.

2.2.3.1 Tujuan Pekerjaan Sosial

Menurut *National Association of Social Workers* (NASW), tujuan utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pekerjaan sosial melibatkan tugas-tugas berikut:

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi masalah, mengembangkan diri, dan mengoptimalkan potensi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem yang menyediakan sumber daya dan layanan kepada individu.
3. Menyambungkan individu dengan sumber daya, layanan, dan peluang yang ada dalam sistem.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Dengan demikian, pekerjaan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan, intervensi, dan perubahan yang positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan, dan advokasi untuk keadilan sosial.

2.2.3.2 Metode-metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial mencakup prosedur dan pendekatan yang digunakan secara teratur dan terstruktur oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Metode ini digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Beberapa metode pekerjaan sosial umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Social Case Work*

Robert Barker dan Helen H.Periman dalam (Favourita et al, 2016) menjelaskan bahwa metode pekerjaan sosial dengan perorangan merupakan orientasi nilai dan bentuk praktik yang digunakan oleh pekerja sosial dimana konsep psikososial, tingkah laku manusia dan sistem-sistem diterjemahkan kedalam keterampilan-keterampilan yang ditujukan untuk membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah intra psikis, antar-pribadi, sosial ekonomi dan lingkungan melalui relasi yang bersifat tatap muka. Menurut Helen H.Periman, metode pekerjaan sosial dengan perorangan adalah suatu proses yang dipergunakan oleh badan sosial tertentu untuk membantu individu agar mereka dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sosial mereka secara lebih efektif. Sedangkan menurut Rex A. Skidmore (1976) dalam (Favourita et al, 2016) *case work* merupakan proses membantu individu-individu untuk mencapai penyesuaian antara individu dengan lingkungan sosialnya. *Case work* bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memperkuat keberfungsian sosial agar mampu menolong dirinya sendiri yang dilakukan secara terorganisir.

2. *Group Work*

Menurut (Payne, 2016) mengemukakan bahwa *group work* adalah metode intervensi pekerjaan sosial yang memanfaatkan dinamika hubungan dalam kelompok sebagai alat pertolongan bagi individu-individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Selanjutnya menurut Robert L.Barker dalam (Favourita et al, 2016), *social group* merupakan sebuah orientasi dan metode

intervensi pekerjaan sosial dimana sejumlah kecil orang-orang yang mempunyai minat atau masalah yang sama mengadakan pertemuan secara teratur dan melibatkan diri dalam kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama.

3. *Community Organization/ Community Development*

Community development menurut Jim Ife (2002:3) bahwa posisi kerja masyarakat dan layanan berbasis masyarakat dalam suatu konteks yang lebih luas dari suatu pendekatan kepada pengembangan masyarakat (*community development*). Istilah yang belakangan ini dipandang sebagai proses pembentukan, atau pembentukan kembali, struktur masyarakat manusia yang memungkinkan berbagai cara baru dalam mengaitkan dan mengorganisasi kehidupan sosial serta pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, kerja manusia dilihat sebagai kegiatan, atau praktik, dari seseorang yang berusaha memfasilitasi proses pengembangan masyarakat tersebut. Layanan berbasis masyarakat dilihat sebagai struktur dan proses untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan mengerahkan sumberdaya, keahlian dan kearifan dari komunitas itu sendiri. Lebih lanjut pengembangan masyarakat (*community work*) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip-prinsip sosial (Suharto, 2017). Menurut Johnson (1984), *community work* merupakan spesialisasi atau setting praktik pekerjaan sosial yang bersifat makro (*macro practice*).

Proses pemberdayaan dalam praktik pekerjaan sosial dengan organisasi atau masyarakat menurut (DuBois & Miley, 2005), adalah sebagai berikut: *Dialogue* (dialog: persiapan sosial); *Discovery* (penemu kenalan: asesmen dan perencanaan); *Development* (pengembangan: moneva). Disebutkan dalam Pedoman Praktikum Komunitas Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bahwa intervensi makro dalam pengembangan masyarakat meliputi kegiatan: inisiasi sosial, pengorganisasian masyarakat, asesmen sosial, perencanaan sosial, intervensi sosial, evaluasi, terminasi dan rujukan.

2.2.3.3 Peranan Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat

Jim Ife (2014) menyatakan bahwa peran pekerja sosial dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peranan Fasilitatif (*Facilitative Role*)

Peranan fasilitatif merupakan peran pekerja sosial yang bertujuan untuk memberikan dorongan semangat atau membangkitkan semangat masyarakat agar mereka dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungannya.

2. Peranan Edukasional (*Educational Role*)

Peranan edukasional melibatkan peran aktif pekerja sosial di dalam proses pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Peranan Representasional (*Representational Role*)

Pekerja sosial bertindak sebagai *enabler* atau agen perubahan, antara lain membantu masyarakat menyadari kondisi dan permasalahan wilayahnya,

mengembangkan relasi agar dapat bekerja sama dengan pihak lain (*networking*), serta membantu dalam membuat suatu perencanaan.

4. Peranan Teknis (*Technical Role*)

Peran teknis adalah peranan yang berkaitan dengan kemampuan pekerja sosial dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam rangka mendukung upaya pemecahan masalah.

Menurut Speregel, Zastrow dan Adi dalam Adi Isbandi Rukminto (2012) mengemukakan bahwa peranan pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemercepat Perubahan (*Enabler*), bertugas membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.
- 2) Perantara (*Broker*), bertugas menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*).
- 3) Pendidik (*Educator*), harus memiliki kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan.
- 4) Tenaga Ahli (*expert*), pekerja sosial sebagai seorang tenaga ahli dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area.
- 5) Perencana Sosial (*Social Planner*), mengumpulkan data mengenai

masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis, menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.

- 6) Advokat (*Advocate*), mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokat atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan.
- 7) Aktivis (*Activist*), peran *activist* menuntut pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang mendasar.

2.2.3.4 Teknik Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat

Edi Suharto (2018: 72) dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial. Alat dan teknologi pada pekerjaan sosial makro sangat penting diterapkan pada saat tahapan-tahapan makro. Dalam melakukan kegiatan makro, alat dan teknologi ini sangat diperlukan karena pekerja sosial berelasi dengan banyak pihak, sehingga pada saat kegiatan dapat berjalan dengan teratur. Alat dan teknologi pada pekerjaan sosial makro memiliki kegunaan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisinya. *Focus Group Discussion* (FGD), teknologi FGD merupakan alat atau teknologi yang digunakan dengan mendatangkan para ahli yang sesuai dengan topik diskusi. Dalam teknik FGD pekerja sosial dapat bertindak sebagai fasilitator atau pemimpin dari kegiatan diskusi. Teknologi ini biasanya digunakan pada pembahasan yang kompleks yang memerlukan bantuan ahli-ahli lainnya.

2.2.3.5 Model Pengembangan Masyarakat

Menurut Tropman dan Rothman (2007), terdapat tiga model pengembangan masyarakat yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat Lokal

Model pengembangan masyarakat lokal merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi dalam masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari anggota masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini melihat masyarakat bukan sebagai kelompok yang memiliki masalah yang perlu diatasi, tetapi sebagai entitas yang unik dengan potensi yang belum sepenuhnya dikembangkan. Model ini melibatkan pendekatan “*bottom-up*” dalam pembangunan masyarakat.

2. Perencanaan Sosial

Model perencanaan sosial merujuk pada proses pragmatis pengambilan keputusan dan penetapan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, buta huruf, dan masalah kesehatan masyarakat. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, model perencanaan sosial lebih berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kelompok sasaran dalam perencanaan sosial sering kali adalah kelompok masyarakat yang kurang mampu atau rentan secara sosial dan ekonomi, seperti lansia, penyandang cacat, janda, yatim piatu, dan perempuan yang menghadapi cacat sosial.

3. Aksi Sosial

Model aksi sosial melibatkan perubahan fundamental dalam lembaga dan struktur masyarakat melalui distribusi kekuasaan, sumber daya, dan pengambilan keputusan yang lebih adil. Pendekatan aksi sosial memandang masyarakat sebagai kelompok klien yang sering kali menjadi korban

ketidakadilan struktural. Kondisi sosial dalam model ini didasarkan pada tujuan, proses, dan hasil. Masyarakat yang terorganisir dengan baik terlibat dalam proses kesadaran, pemberdayaan, dan tindakan efektif untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan.

2.2.3.6 Strategi Pengembangan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2006), strategi merupakan upaya komprehensif yang bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan diterima oleh mereka yang terlibat atau berbagai kelompok yang terlibat (*stakeholder*) dan dapat diikutsertakan dalam proses perubahan. Taktik menentukan teknik khusus termasuk perilaku khusus yang digunakan untuk membuat strategi bekerja seperti yang diharapkan. Netting, Ketter, dan McMurtry (2004) menyatakan bahwa tiga strategi diuraikan yang dapat diterapkan dalam perubahan terencana dan pekerjaan pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Kolaborasi

Kolaborasi adalah hubungan kooperatif antara sistem perubahan di mana mereka setuju bahwa perubahan harus dilakukan. Fokus pada solusi *win-win*, setiap sistem menerima perubahan dan mendukung pembagian sumber daya. Taktik dalam strategi ini yaitu implementasi dari *capacity building*. Implementasi yaitu melaksanakan perubahan atau aksi pemecahan masalah karena masing-masing pihak telah sepakat, sedangkan *capacity building* dilakukan dengan teknik perluasan partisipasi atau pemberdayaan kelompok-kelompok lemah.

2. Kampanye

Kampanye mengacu pada tindakan yang meyakinkan pihak lain (sistem) tentang pentingnya perubahan. Komunikasi antar sistem terus berlanjut. Misalnya sistem target masih ingin berkomunikasi dengan sistem operasi, tetapi masih memerlukan persetujuan untuk melakukan perubahan, atau sistem target mendukung perubahan tetapi tidak menyediakan atau tidak menyediakan alokasi sumber daya. Strategi ini masih relatif berorientasi pada *win-win solution*. Taktik dalam strategi tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan isu-isu kontroversial, persuasi melalui kolaborasi atau lobi, dan melibatkan media massa dalam memperluas dukungan.

3. Kontes

Persaingan berarti kegiatan kompetitif yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*) dan digunakan ketika tidak ada pihak yang telah atau masih belum memiliki kesepakatan atas perubahan yang diusulkan. Taktik yang tersedia adalah:

- 1) Tawar-menawar dan negosiasi, langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi antara pihak dalam masyarakat yang dipandang dapat menyelesaikan suatu permasalahan.
- 2) Aksi sosial di tingkat komunitas atau kelompok besar dapat bersifat legal (*demonstrasi*) atau *illegal* (pengembangan publik). Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memobilisasi masyarakat untuk melakukan suatu aksi massa berupa unjuk rasa atau aksi massa berupa penolakan, pembangkang terhadap suatu keputusan dan kebijakan tertentu.